



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 13 Desember 2016

Halaman: 9

Panwas Kekurangan Bukti

JOGJA, BERNAS -- Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Yogyakarta mengingatkan seluruh pasangan calon kepala daerah untuk tidak memanfaatkan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye pada Pilkada 2017.

"Kami mendapat laporan adanya indikasi penggunaan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye," kata Agus Muhammad Yasin, Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota Yogyakarta, Senin (12/12).

Menurut dia, Panwas Pilkada Kota Yogyakarta sudah berusaha semaksimal mungkin menindaklanjuti laporan tersebut namun tidak dapat memprosesnya lebih lanjut karena kekurangan bukti.

"Jika tidak disertai bukti kuat, maka bisa berpotensi menjadi fitnah. Namun kami akan tetap mencatatnya sebagai laporan," katanya.

Jika laporan tersebut disertai bukti kuat, maka sanksi yang akan diberikan adalah pelanggaran administrasi. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti laporan tersebut Panwas Pilkada Kota Yogyakarta akan mengumpulkan partai politik dan ormas sekilas tim pendukung dari tiap pasangan calon kepala daerah untuk memberikan edukasi dan mengingatkan mereka agar tidak menggunakan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye.

Tempat ibadah yang dimaksud, lanjut Agus, tidak hanya terbatas masjid tetapi juga gereja, pura, wihara dan tempat ibadah untuk pemeluk agama lain. "Semuanya tidak boleh digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kampanye pilkada," katanya.

Sedangkan untuk indikasi pelanggaran lain selama kampanye seperti politik uang, Agus mengatakan, belum menerima laporan apapun.

Sementara itu, untuk penertiban pelanggaran alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan, Panwas sudah melakukan penertiban hingga tahap tiga.

"Masih banyak alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan. Penertiban akan dilakukan bertahap," katanya yang sudah menerbitkan sekitar 90 alat peraga kampanye dari tiga kali penertiban.

Fasilitasi KPU
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta akan memfasilitasi masing-masing satu tempat pemungutan suara di Rutan dan Lapas Wirogunan Yogyakarta pada Pilkada Kota Yogyakarta, 15 Februari 2017.

"Akan ada tempat pemungutan suara (TPS) di Rutan dan Lapas Wirogunan. Bukan TPS khusus. TPS di rutan masuk sebagai TPS 10 Gunungketur, dan di lapas masuk sebagai TPS 11 Gunungketur," kata Wawan Budiyo, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Sabtu (10/12).

Menurut dia, KPU Kota Yogyakarta juga sudah memasukkan daftar warga binaan yang ada di rutan dan lapas tersebut sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Jumlah warga binaan yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk Pilkada Kota Yogyakarta 2017 di Rutan Wirogunan tercatat 63 orang, dan di Lapas Wirogunan tercatat 34 orang.

Sedangkan untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di rutan dan lapas akan berasal dari petugas yang ada di kedua instansi tersebut.

"Bagi petugas rutan atau lapas yang bertugas pada hari H pemungutan suara dan memiliki hak untuk memilih, bisa menggunakan formulir A5 sehingga bisa memilih di TPS tersebut," katanya.

Selain TPS di rutan dan lapas, KPU Kota Yogyakarta juga akan membuka satu TPS di rumah sakit yaitu di RS Panti Rapih. Meskipun berada di rumah sakit, namun TPS tersebut bukan merupakan TPS khusus.

"TPS di Panti Rapih adalah TPS untuk masyarakat umum. Hanya saja, lokasinya memang di rumah sakit sehingga bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi petugas medis dan pasien yang kebetulan sedang berada di rumah sakit tersebut pada hari H pilkada," katanya.

KPU Kota Yogyakarta menetapkan sebanyak 298.989 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di 794 TPS. KPU sedang melakukan sosialisasi DPT ke wilayah.

"Warga yang belum terdata sebagai pemilih masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan membawa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan penduduk Kota Yogyakarta pada hari H pemungutan suara. Pelayanan akan dilakukan setelah pukul 12.00 WIB," katanya.

Siapkan personel
Kesiapan menjelang pelaksanaan Pilkada juga dilaksanakan Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta menyiapkan personel perlindungan masyarakat yang ada di wilayah untuk membantu pengamanan tempat pemungutan suara pada saat pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

"Kami akan siapkan masing-masing dua anggota perlindungan masyarakat (linmas) di tiap tempat pemungutan suara (TPS) pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada)," kata Sukanto, Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Minggu (11/12).

Menurut dia, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh personel linmas yang akan ditugaskan membantu pengamanan di tiap TPS.

Sukanto mengatakan, pengamanan yang dilakukan oleh personel linmas di TPS tidak hanya dilakukan pada hari H pemungutan suara, 15 Februari 2017, tetapi sudah dilakukan sejak persiapan pembangunan TPS.

"Mulai dari persiapan pembangunan TPS, hingga pengamanan saat logistik tiba di TPS, pada saat pemungutan suara sampai pengiriman logistik ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) usai penghitungan suara. Semuanya harus bisa berjalan lancar dan aman," katanya.

Selain di tiap TPS, personel linmas juga akan ditempatkan di tiap kelurahan, kecamatan hingga di tingkat Kota Yogyakarta untuk membantu pengamanan Pilkada 2017.

Jumlah personel linmas di tiap kelurahan sebanyak 10 orang, tiap kecamatan 31 personel dan total sebanyak 100 personel di tingkat Kota Yogyakarta.

"Seluruh anggota linmas yang bertugas di TPS hingga di tingkat Kota Yogyakarta harus bisa bersikap netral, tidak memihak salah satu pasangan calon," katanya. (ant)

☐ Negatif ☐ Amat Segera
☐ Positif ☐ Segera
☒ Netral ☒ Biasa

Tindak Lanjut
☐ Untuk Dilanggapi
☒ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala
Ttd
Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005